



LEMBARAN KALURAHAN SAMBIREJO
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Sambirejo)

Nomor : 10

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SAMBIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah kalurahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomer 6 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ini telah di Evaluasi oleh Panewu dengan Keputusan Panewu Ngawen Nomor 43 /KPTS/2025 tertanggal 23 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang -Undang nomor 123 tahun 2024 tentang
5. Kabupaten Gunungkidul di Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Tahun
6. 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ;(Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita negara tahun 2022 Nomor 1295);sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK 201 .PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (
 14. Berita Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 7 tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 2018 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 20):
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026; (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor);
25. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pungutan Desa; (Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Sambirejo No. 6 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan local berskala desa: (Lembaran Desa Sambirejo tahun 2019 No. 6)
28. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 4 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sambirejo Tahun 2020 - 2025; (Lembaran Kalurahan Sambirejo Tahun 2022 Nomor 4) ;

29. Peraturan Kalurahan Sambirejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

LURAH SAMBIREJO dan BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SAMBIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2026 , dengan perincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.565.820.500 ,00
2.Belanja Kalurahan	: <u>Rp. 2.241.234.475,00</u>
Surplus / (Defisit)	: Rp. 324.586.025,00

3.Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	:Rp. 28.913.975,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:Rp. 353.500.000,00
-Intersep KDMP	: Rp. 117.800.000,00
- Penyertaan modal desa	: Rp. 235.700.000 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	:Rp. 324.586.025,00
Pembiayaan Netto	:Rp. (324.586.025,00)

Sisa Lebih/ (Kurang) Pembiayaan Anggaran	:Rp. 0,00
------------------------------------------	-----------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Sambirejo

Ditetapkan di Sambirejo
pada tanggal 29 Desember 2025

Lurah Sambirejo,

ttd

PARYATI

Diundangkan di : Sambirejo
pada tanggal : 29 Desember 2025

Carik Sambirejo,

ttd

ARIF RIYADI

LEMBARAN KALURAHAN SAMBIREJO TAHUN 2025 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.950.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.529.120.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.565.820.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	731.800.821,68	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.221.759.365,32	
5.3.	Belanja Modal	250.374.288,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.241.234.475,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	324.586.025,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	28.913.975,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	28.913.975,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	353.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	235.700.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	117.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(324.586.025,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SAMBIREJO, 11 May 2026



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	31.950.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.529.120.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.565.820.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.213.885.409,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	924.193.657,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	584.470.150,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	584.470.150,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.904.991,68	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.904.991,68	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	82.794.055,32	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.794.055,32	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.715.680,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.715.680,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.400.000,00	DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.098.780,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.098.780,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	35.100.000,00	DDS
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.1.99	5.3.	Belanja Modal	28.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	169.534.752,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	117.459.752,00	DDS, PAD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.459.752,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	40.925.000,00	PAD, PBH, PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	39.425.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	6.150.000,00	ADD, PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PAD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.916.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.111.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.111.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.245.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.245.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.560.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.711.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.220.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.550.000,00	ADD, DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.770.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.065.000,00	ADD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.065.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.320.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.000.000,00	ADD, PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.551.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.551.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	7.365.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.365.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	10.200.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.670.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2.530.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.530.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>791.160.216,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	105.625.928,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	96.625.928,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.625.928,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.000.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	225.722.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	44.485.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.485.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.285.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.285.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.045.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.045.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.050.000,00	PBP
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	15.457.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.457.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	57.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	79.800.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	162.199.288,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	146.301.736,00	DDS, PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	144.351.736,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	15.897.552,00	DDS, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	15.897.552,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	290.913.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	290.913.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.913.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>141.099.850,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.135.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.410.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.725.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.725.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	54.462.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	7.500.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	1.375.000,00	DDS
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	45.587.000,00	DDS, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.587.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	51.325.850,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	27.615.850,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.615.850,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19.850.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.860.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.177.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	11.220.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.220.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	8.632.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.632.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.925.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>57.789.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.973.000,00	
4.2.90		Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana	2.640.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	13.333.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.333.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.130.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	12.130.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.130.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.410.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.260.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.260.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.150.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.720.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	12.720.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.430.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.430.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.430.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.126.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8.126.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.126.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>37.300.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.900.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.900.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.900.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.241.234.475,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			324.586.025,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	28.913.975,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	353.500.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO			(324.586.025,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

SAMBIREJO, 11 May 2026

